

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT KESEHATAN, DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Ni Luh Made Ariasih¹, Ni Nyoman Yuliarmi²
Universitas Udayana, Bali^{1,2}
ariasih08@gmail.com¹, nyuliarmi@unud.ac.id²

Received: 29-06-2021
Revised : 20-07-2021
Accepted: 25-07-2021

Abstrak

Latar Belakang: Tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Bali terjadi dikarenakan adanya kesenjangan dan belum meratanya proses pembangunan ekonomi.

Tujuan: Penelitian dilakukan untuk menganalisa secara simultan dan parsial tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Serta untuk menganalisa variabel bebas yang berpengaruh secara dominan terhadap tingkat kemiskinan

Metode: Riset ini memakai jenis riset kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

Hasil: Hasil riset ini menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial tingkat pendidikan, serta pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Bali. Sementara itu, variabel tingkat kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kesimpulan: Variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap tingkat kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan.

Kata kunci: kemiskinan, bali; kesehatan; pengangguran terbuka; tingkat pendidikan.

Abstract

Background: The level of poverty in Bali Province occurs due to inequality and the uneven process of economic development.

Objective: The research was conducted to analyze simultaneously and partially the level of education, health level, and open unemployment rate to the poverty level. As well as to analyze the independent variables that have a dominant influence on the poverty level.

Methods: This research uses quantitative research with an associative approach.

Results: The results of this research conclude that simultaneously and partially the level of education, as well as open unemployment have an effect on poverty in Bali. Meanwhile, the health level variable partially has a negative and insignificant effect on poverty in the districts/cities of Bali Province.

Conclusion: *The variable that has a dominant influence on the level of poverty is the level of education.*

Keywords: *poverty, bali; health; unemployment open; level of education.*

Corresponden Author : Ni Luh Made Ariasih

Email : Ariasih08@gmail.com



PENDAHULUAN

Vicious circle of poverty atau teori dari lingkaran setan kemiskinan mengungkapkan negara yang sedang berkembang itu mengalami kemiskinan, dikarenakan adanya kegiatan produktivitas yang dinilai rendah, sehingga menyebabkan pendapatan masyarakatnya yang rendah, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang *minimum* sebagai akibatnya modal masyarakat akan berkurang karena masyarakat yang tidak dapat menabung (Nurkse dalam (Kuncoro, 2004). Menurut (Manning & Junankar, 1998) pada era pembangunan, warga miskin yang tidak bisa menyesuaikan keadaan dikatakan mengakibatkan pengangguran. Kemiskinan merupakan konsekuensi dari banyaknya jumlah penduduk dalam usia kerja yang menganggur, hal ini dapat terjadi diakibatkan oleh rendahnya pendidikan (Seran, 2017).

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat (Dariwardani, 2014) bahwa pendidikan tentunya berkaitan dengan fenomena kemiskinan, dimana secara general semakin tinggi pendidikan masyarakat maka fenomena kemiskinan akan semakin rendah. Namun lulusan pendidikan tinggi yang banyak menganggur menyebabkan masalah serius bagi negara (Lim, 2011). Pengangguran yang disebabkan oleh lulusan pendidikan tinggi berarti tidak memanfaatkan sumber daya manusianya dengan baik. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut (Meidani, 2011). Ini dikarenakan system pendidikan diamati tidak sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang diperlukan di lapangan pekerjaan (Mahmood & et al, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh peningkatan produktivitas. Melalui peningkatan kualitas pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas dalam perekonomian secara menyeluruh yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Tingginya kualitas pendidikan masyarakat menimbulkan ide-ide kreatif baru yang memunculkan pengusaha-pengusaha kreatif dilihat melalui penciptaan UMKM baru yang senantiasa bermunculan. UMKM memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar (Yuta, Ropika, & Suhartini, 2014). Meningkatnya UMKM maka akan terjadi kenaikan penyerapan dan kesempatan kerja yang tinggi. Secara berangsur-angsur akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan. Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan semakin tinggi pendapatannya (Tisnawati & Shabrina, 2014).

Fenomena ini akan mendorong proses kenaikan kesejahteraan masyarakat dan turunnya angka kemiskinan. Maka dari itu peluang kesempatan kerja yang terbuka bagi masyarakat miskin wajib diperhatikan dalam rangka mempertahankan daya beli sehingga setiap terjadi peningkatan pendapatan akan lebih berarti untuk mencukupi kebutuhan dasar atau dalam hal meningkatkan kualitas hidup (Sri Budhi, 2013). Oleh sebab itu perhatian terhadap kualitas pendidikan esensial dalam usaha pengentasan kemiskinan. Bali adalah salah satu provinsi yang mempunyai perekonomian dengan perkembangan yang sangat cepat, akan tetapi pada kondisi tersebut jumlah penduduk miskin nya masalah sangat tinggi dan seringkali lebih banyak dijumpai pada daerah pedesaan. Hal ini menunjuk provinsi Bali harus memberikan perhatian yang khusus mengenai kemiskinan oleh pemerintah. Berikut merupakan tingkat kemiskinan pada tahun 2010 – 2019 yang dijelaskan pada Tabel 1 seperti dibawah ini.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2019

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jembrana	8.11	6.56	5.74	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.2	4.88	5.84
Tabanan	6.96	5.62	4.9	5.21	5.61	5.52	5	4.92	4.46	4.21	5.24
Badung	3.23	2.62	2.16	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78	2.32
Gianyar	6.68	5.4	4.69	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.19	3.88	4.71
Klungkung	7.58	6.1	5.37	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	5.86	5.4	6.38
Bangli	6.41	5.16	4.52	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	4.89	4.44	5.29
Karangasem	7.95	6.43	5.63	6.88	7.3	7.44	6.61	6.55	6.28	6.25	6.73
Buleleng	7.35	5.93	5.19	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	5.36	5.19	6.03
Denpasar	2.21	1.79	1.52	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.24	2.1	2.09
Provinsi Bali	5.67	4.59	3.95	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79	5.84

Source: (BPS, Provinsi Bali, 2020)

Pada Tabel 1 menurut informasi data yang diluncurkan oleh BPS Provinsi Bali, penduduk yang miskin persentasenya tahun ke tahun cenderung tidak adanya perubahan yang signifikan, standar hidup yang lebih baik pada kondisi masyarakat. Di samping itu, data juga menunjukkan bahwa di Provinsi Bali terdapat perbedaan yang mencolok mengenai persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota. Penyumbang kemiskinan terbesar jatuh kepada sektor pertanian (Wardhana, Ihle, & Heijman, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan kesenjangan ekonomi regional/antar wilayah. Maka dari itu sangat diperlukan menaikkan pertumbuhan ekonomi agar bisa mengurangi kemiskinan (Dollar & Aart Kraay, 2002). Negara berkembang seperti Indonesia paling umum mempunyai masalah pada kemiskinan (Vincent, 2009). Menurut (Williamson, 2001) pemberantasan kemiskinan menjadi tujuan utama dari pembangunan manusia.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Bali Berumur 15 Tahun ke atas yang termasuk Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Kabupaten/ Kota	Tidak/Belum Tamat SD	SD	SM P	SMA	SM K	D. I/II	D. III	D. IV/S1	S2/S 3	Jumlah
	Jembrana	0	156	157	1231	143	177	0	177	0
Tabanan	216	151	0	1117	1110	168	0	724	0	3486
Badung	0	0	0	438	239	196	565	0	0	1438
Gianyar	0	365	153	1067	1861	175	252	440	0	4313
Klungkung	171	324	125	652	175	0	97	89	0	1633
Bangli	0	0	79	647	0	175	0	144	0	1045
Karangasem	0	0	284	665	423	0	154	0	0	1526
Buleleng	678	793	945	2994	3387	871	0	812	0	10480
Denpasar	0	287	1344	1990	2095	1639	420	3814	0	11589
Jumlah	1065	2076	3087	10801	9433	3401	1488	6200	0	37551

Source: BPS Provinsi Bali, 2020

Tabel 2 Jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan pada Provinsi Bali, sebagian besar masyarakat yang tidak bekerja berasal dari masyarakat yang pendidikan terakhirnya SMA/SMK dan Sarjana/Diploma IV. Ini mencerminkan bahwa jenjang pendidikan yang

lebih tinggi, tidak menjamin bahwa semua penduduk memperoleh pekerjaan. Penduduk dengan tingginya jenjang pendidikan yang tidak bekerja/menganggur, tidak dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Karena pada dasarnya, pengangguran terdidik memilih menganggur karena belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang didapatkan saat bersekolah atau sedang membantu usaha keluarga, sehingga tercatat tidak bekerja. Dan keluarga masih bisa mendukung kebutuhan hidup pengangguran terdidik. Sehingga, tingginya tingkat pendidikan tidak mencerminkan kondisi kemiskinan di Provinsi Bali. Pendidikan tinggi yang diharapkan membrantas kemiskinan menjadi keliru, salah satu penyebab yang menjadikan bertambahnya pengangguran terdidik (Ewubare, Ogbuagu, & Regina, 2017). Jika ditinjau dari rata-rata harapan hidup saat lahir di Provinsi Bali cukup tinggi. Meskipun rata-rata setiap tahun meningkat, namun tidak memperlihatkan pengaruh langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan taraf pengangguran terbuka di Provinsi Bali cenderung fluktuatif, yang rata-rata mengarah pada penurunan, namun tingkat kemiskinan cenderung konstan/tidak ada perubahan baik penurunan ataupun peningkatan yang terlalu signifikan. Hal ini dapat terjadi karena antar kabupaten/kota rata-rata persentase penduduk miskin yang bervariasi.

Riset ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial tingkat pendidikan (X_1), tingkat kesehatan (X_2), dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tingkat Pendidikan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Riset dari Purnami dan Saskara (2016), menyimpulkan variabel pendidikan mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil riset ini didukung dari studi empiris peneliti seperti (Wahyu & et, 2018) menerangkan hasil yang sama namun berlokasi di kab/kota Prov Jawa Timur. Teori *Human Capital* yaitu modal manusia yang ditemukan oleh (Becker, 1993), teori ini mengajarkan bahwa pendidikan bisa meningkatkan keahlian atau *skill* yang bisa meningkatkan produktivitas. Teori ini juga menyatakan apabila karyawan/pekerja mempunyai produktivitas yang baik, maka tingkat pendapatan yang diberikan dari perusahaan juga akan meningkat.

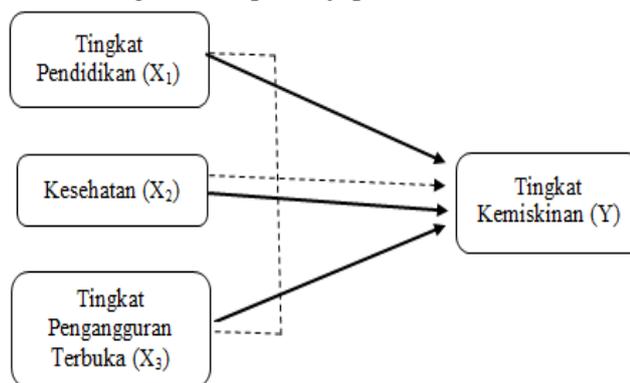
Terdapat teori lingkaran setan yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pendidikan yang ditempuh rendah, bisa mempengaruhi produktivitas SDM yang rendah, dan mengakibatkan mendapatkan upah yang rendah pula, sehingga bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Maka dari itu, sangat penting pemerintah untuk mewajibkan biaya pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, agar kedepannya bisa memutus tali lingkaran setan.

Tingkat kesehatan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesehatan ialah sebuah aspek penting dalam mendukung kesuksesan pada pembangunan khususnya untuk menaikkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut ditandai dengan angka harapan hidup atau AHH yaitu rerata hidup seseorang dalam setahun, sampai dengan tahun tertentu atau x , dalam kondisi mortalitas yang ada di sekitarnya. (BPS 2020) Semakin tinggi AHH, maka semakin menampakan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Riset yang dilaksanakan Faisal (Faisal, 2013), menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan dan tingkat produktivitas di Provinsi Kalimantan Barat. Namun riset yang dilakukan oleh Wongdesmiwati, yang menyimpulkan bahwa variabel angka harapan hidup tidak signifikan berpengaruh terhadap warga miskin (Wongdesmiwati, 2009). Studi empiris lain (Fitri & Kaluge, 2017) bahwa variabel biaya pemerintahan di sektor tingkat kesehatan berdampak positif dan

tidak signifikan. Karena tidak sejalannya penambahan kesehatan warga dengan kuantitas kesempatan kerja baru.

Tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang didukung oleh beberapa riset sebelumnya. Studi empiris dilakukan oleh (Adi & Arka, 2018), (Malat & Jeffrey, 2013), (Aristina, Kembar, & Darsana, 2017), (Hu & Giuliano, 2017), (Wirawan & Arka, 2015), (Williams, 2008), (Yanthi & Marheni, 2015), menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka mempunyai hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin bertambahnya pengangguran maka akan mengakibatkan adanya pertambahan penduduk yang tidak produktif, sehingga hal tersebut tidak dapat mencukupi keperluan kehidupannya, ketika keperluannya tidak tercukupi dapat mengakibatkan tergoncangnya stabilitas dalam politik negara, selain itu juga dapat mengakibatkan bertambahnya angka kejahatan (Azeng & Thierry, 1991-2009). Hubungan antar variable pada riset ini ditunjukkan pada gambar kerangka konsep tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan dalam Kerangka Konseptualnya

Berdasarkan kerangka konsep diatas, hipotesis penelitiannya dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Tingkat pendidikan (X_1), tingkat kesehatan (X_2), dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y); 2) Tingkat pendidikan (X_1) secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y); 3) Tingkat kesehatan (X_2) secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y); dan 4) Tingkat pengangguran terbuka (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Y). Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai tingkat kemiskinan, terutama di Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Ariasih et.al yang berjudul Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Temuan dari penelitian ini yakni perlunya pemerintah daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan dana anggaran pendidikan minimum 20 persen dari total APBD dan APBN, terbukti dari persentase biaya pendidikan pada 2015 hingga 2019 rata rata berada dibawah 20 persen dari APBD Provinsi Bali. Rata rata hasil dari persentase biaya pendidikan dari tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, terbilang belum sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31 bag 4 mengenai biaya pendidikan minimum 20 persen dari total APBD dan APBN. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), dan mengakibatkan produktivitas SDM menjadi turun kualitasnya. Akibat dari penurunan kualitas SDM bisa mengakibatkan meningkatnya pengangguran akibat dari rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa memicu meningkatnya tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai jenis riset kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Riset kuantitatif merupakan teknik riset yang didasari dengan falsafah positifisme guna untuk mengamati pada populasi/sampel yang telah ditetapkan, riset kuantitatif ini memiliki sasaran untuk melakukan pengujian hipotesa yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013). Riset asosiatif mempunyai tujuan untuk mencari tahu pengaruh di antara variabel. Dalam riset ini pengertian operasional dari setiap variabel akan dijelaskan seperti dibawah ini: 1) Tingkat kemiskinan (Y), diperoleh dengan kriteria tertentu dari Badan Pusat Statistik Prov. Bali, tingkat kemiskinan dapat diukur melalui persentase penduduk miskin menurut kabupaten atau kota, berlaku pada 2010-2019 dengan satuan persentase; 2) Tingkat Pendidikan (X_1) adalah rerata lamanya sekolah di lokasi yang diteliti, tahun 2010-2019 dengan pengukuran skala rasio, dalam satuan tahun; 3) Tingkat kesehatan (X_2), diukur dengan menggunakan angka harapan hidup. AHH di Prov Bali, kurun waktu 2010-2019 diukur menggunakan satuan tahun, 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3) ialah jumlah persentase pengangguran dengan kondisi seseorang termasuk pada angkatan kerja namun belum mendapatkan suatu pekerjaan. Indikatornya yaitu Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2010-2019 di kabupaten/kota Provinsi Bali, dengan pengukuran dalam satuan persen.

Riset ini memakai metode analisa dengan persamaan regresi linear berganda, guna mengetahui pengaruh variabel pendidikan, kesehatan, serta pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Menurut (Wirawan N. , 2017), persamaan regresi liner berganda bentuk umumnya seperti dibawah ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u \dots \dots \dots$$

Ket: Y = Kemiskinan, X_1 = Tingkat Pendidikan, X_2 = Tingkat Kesehatan, X_3 = Pengangguran terbuka, α = Intersept, β = Koefisien regresi., u = Variabel pengganggu.

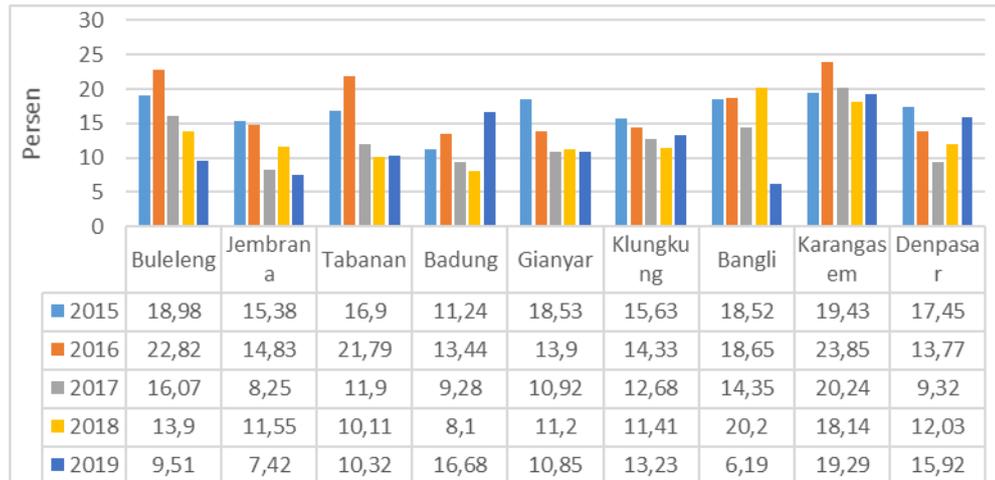
Menurut Widarjono (2009), data panel merupakan data yang di teliti selama kurun waktu yang ditentukan (*time series*) yang merupakan data individual (*cross section*). *Time series* gunanya melihat perubahan pada waktu yang ditentukan, sedangkan *cross section* untuk mencari tahu apakah adanya perbedaan diantara antar kabupaten atau kota. Estimasi dari regresi data panel mempunyai tiga pendekatan, bentuk yang sering dipakai pada regresi data panel yakni, bentuk *random effect*, bentuk *fixed effect*, serta bentuk *common effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persentase Biaya Pendidikan berdasarkan diKabupaten/kota Provinsi Bali di Luar Transfer Daerah Tahun 2015-2019

Biaya pendidikan ialah suatu susunan yang direncanakan secara sistematis pada bentuk angka dan diinterpretasikan pada unit moneter dengan lokasi fungsi pendidikan yang disalurkan dengan lembaga atau kementerian negara mengalokasikan biaya pendidikan dengan dikirim ke wilayah dan pengeluaran pembiayaan. Lebih jelasnya berikut ini merupakan Gambar 2:



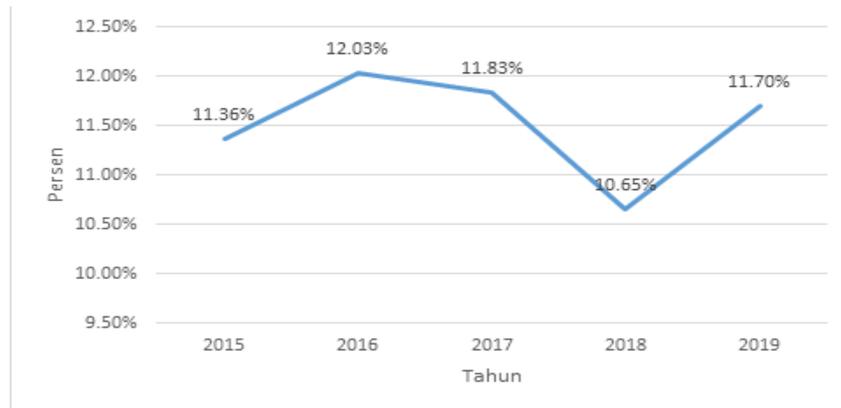
Sumber: Kemendikbud.go.id, Neraca Pendidikan Daerah 2019

Gambar 2 Persentase Anggaran Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali di Luar Transfer Daerah Tahun 2015-2019

Gambar 2 dapat diamati bahwa persentase biaya pendidikan pada 2015 hingga 2019 rata rata berada dibawah 20 persen dari APBD Provinsi Bali. Biaya pendidikan mengalami fluktuasi, Rata rata hasil dari persentase biaya pendidikan dari tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, terbilang belum sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31 bag 4 mengenai biaya pendidikan minimum 20 persen dari total APBD dan APBN. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), dan mengakibatkan produktivitas SDM menjadi turun kualitasnya. Sesuai dengan teori lingkaran setan apabila tingkat pendidikannya rendah, mempengaruhi produktivitas SDM rendah, dan mengakibatkan mendapatkan upah yang minim, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Menurut (Shah, Shanzadi, & Jean, 2012) apabila pendidikan meningkat, maka bisa meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Maka dari itu, sangat penting pemerintah untuk mewajibkan biaya pendidikan minimal 20% dari APBD, guna memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, agar kedepannya bisa memutus tali lingkaran setan.

2. Persentase Biaya Kesehatan terhadap APBD Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Biaya kesehatan merupakan susunan perencanaan sistematis dengan bentuk angka dalam unit moneter pada alokasi fungsi kesehatan. Asal biaya kesehatan bersumber dari pemerintahan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Pemerintah wajib memenuhi hak hak kesehatan warga Negara, sesuai UU Kesehatan Nomor 36 Thn 2009 perihal kesehatan biaya kesehatan wilayah provinsi, kabupaten atau kota, mempunyai pengalokasian minimum 10% dari APBD tidak termasuk dengan gaji atau pembelanjaan karyawan. Berikut merupakan persentase biaya kesehatan terhadap APBD Prov. Bali tahun 2015 sampai 2019.



Source: Sunprog Diskes Prov. Bali, Bappeda Litbang Prov. Bali 2019

Gambar 3 Persentase Biaya Kesehatan Terhadap APBD Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Gambar 3 Tahun 2015, Provinsi Bali memperoleh nilai 11.36%, dan meningkat di tahun 2016 menjadi 12.03 persen. Namun pada 2017 terus menurun hingga tahun 2018 mendapat nilai 10.65%, tetapi masih diatas biaya minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan menjadi 11.70 persen. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa biaya kesehatan di Provinsi Bali sudah tergolong bagus dan diatas rata rata alokasi minimal. Apabila biaya kesehatan sudah tergolong baik, maka persentase masyarakatnya yang sehat juga tergolong tinggi. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Studi empiris yang dilakukan oleh Herry Faisal (2013), menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan, studi empiris yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) menyatakan bahwa variabel angka harapan hidup tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin. Studi empiris lain dari Fithri dan Kaluge (2017) bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor tingkat kesehatan memiliki dampak positif dan tidak signifikan.

3. Perkembangan Upah Minimal Kabupaten atau Kota (UMK) Provinsi Bali Tahun 2015-2019

UMK atau Upah minimum kabupaten/kota ialah gaji minimal yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi. Penetapan upah ini didasari Perpres No 78 Tahun 2015. Pemerintah kota/kabupaten biasa menetapkan upah setiap setahun sekali. Upah minimum setiap kabupaten/kota biasanya berbeda-beda nominalnya, ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu faktornya yaitu Kebutuhan Layak Hidup yang melingkupi standar biaya hidup selama satu tahun dengan layak.

Tabel 3. Persentase Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	1,662,500	-	2,006,617	2,181,393	2,356,559
Tabanan	1,706,700	1,902,970	2,059,965	2,239,500	2,419,332
Badung	1,905,000	2,124,075	2,299,311	2,499,581	2,700,297
Gianyar	1,707,750	1,904,141	2,061,233	2,240,766	2,421,000
Klungkung	1,650,000	1,839,750	1,991,529	2,164,992	2,338,840

Bangli	1,622,000	1,808,530	1,957,734	2,128,253	2,299,152
Karangasem	1,700,000	1,895,500	2,051,879	2,180,000	2,355,054
Buleleng	1,650,000	1,839,750	1,991,529	2,165,000	2,338,850
Denpasar	1,800,000	2,007,000	2,173,000	2,363,000	2,553,000
Provinsi Bali	1,621,172	1,807,600	1,956,727	2,127,157	2,297,969

Source: BPS Provinsi Bali, 2021

Tabel 3 persentase upah minimal kabupaten/kota Provinsi Bali 2015-2019 mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 hingga 2019 Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama UMK tertinggi se-Provinsi Bali. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat 3 Permenaker Upah Minimum menyebutkan bahwa jumlah UMK harus lebih besar daripada UMP. Akibat dari diberlakukannya ketetapan kebijakan upah minimum yang akan memberikan pengurangan pada permintaan pegawai pada sektor formal. Sehingga menyebabkan lebihnya penawaran pada kepegawaian pada sektor formal, kemudian kondisi ini akan diserap oleh sektor informal yang mempunyai taraf yang tidak mengacu pada kebijakan UMR. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan kelebihan penawaran pada sektor informal akan memberikan penurunan pada saraf upah yang diberikan. Apabila hal ini terus terjadi maka akan berimbas pada distribusi penghasilan yang akan menurun pada sektor informal (Borjas, 2008).

4. Perkembangan Investasi Total (Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri) Kabupaten atau Kota (Juta Rupiah) Tahun 2014-2018

Investasi merupakan kegiatan dalam pengeluaran investasi dalam pembelian benda atau peralatan agar dapat menambah pembuatan jasa atau barang, dengan pengharapan mendapatkan keuntungan dari hasil dan nilai tambah dari penanaman modal tersebut (Sukirno, 2010).

Tabel 4. Perkembangan Investasi Total (PMA dan PMDA) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Juta Rupiah) Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	223,570	191,799	7,065,808	276,070	4,409,436
Tabanan	744,363	445,410	5,298,554	189,994	141,794
Badung	2,618,137	6,329,401	624,889	5,910,933	603,994
Gianyar	542,270	1,217,136	810,558	186,985	398,945
Klungkung	71,603	147,976	559,972	2,980,985	65,959
Bangli	24,412	30,780	15,652	26,451	82,586
Karangasem	138,548	169,953	1,086,105	393,875	5,337,150
Buleleng	3,359,929	1,611,311	419,647	1,126,412	2,453,691
Denpasar	1,200,443	15,728,798	166,431	6,366,390	5,138,574

Source: BPS Prov. Bali, 2021

Tabel 4 merupakan perkembangan investasi total dari gabungan investasi asing dan investasi dalam negeri dalam satuan juta rupiah kurun waktu tahun 2014-2018. Tahun 2014-2017 perkembangan investasi terendah diperoleh dari Kabupaten Bangli. Investasi tertinggi pada tahun 2014 diperoleh Kabupaten Buleleng dengan nominal 3,359,929 juta rupiah. Berdasarkan Teori dari Harod Domarr (Mulyadi, 2003) berpendapat yaitu, investasii bisa menambah jumlah produksi. Ini artinya bahwa semakin meningkat kapasitas produksi suatu

perusahaan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap tenaga kerja, dengan asumsi *fullemployment* (pengerjaan penuh). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat terjadi juga merupakan campur tangan pemerintah yang harus aktif di dalamnya (Dalamagas, 2010).

5. Deskripsi Data Hasil Riset

a) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ialah sebuah permasalahan dalam kekurangan keuangan dan barang yang sangat kompleks yang menyebabkan sulitnya memenuhi keperluan hidup, seringkali ditemukan di berbagai negara atau wilayah. Menurut (Dartanto & Nurkholis, 2013) jabatan dalam pekerjaan, adanya perubahan di dalam bidang pekerjaan, dan tidak stabilnya kesehatan merupakan salah satu ciri ciri dinamika dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan dapat ditunjukkan pada Tabel 5 mengenai presentasi warga miskin berdasarkan wilayah kabupaten atau kota Provinsi Bali.

Tabel 5. Persentase Warga Miskin Berdasarkan Kabupaten atau Kota Tahun 2010-2019

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jembrana	8.11	6.56	5.74	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.2	4.88	5.84
Tabanan	6.96	5.62	4.9	5.21	5.61	5.52	5	4.92	4.46	4.21	5.24
Badung	3.23	2.62	2.16	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78	2.32
Gianyar	6.68	5.4	4.69	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.19	3.88	4.71
Klungkung	7.58	6.1	5.37	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	5.86	5.4	6.38
Bangli	6.41	5.16	4.52	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	4.89	4.44	5.29
Karangasem	7.95	6.43	5.63	6.88	7.3	7.44	6.61	6.55	6.28	6.25	6.73
Buleleng	7.35	5.93	5.19	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	5.36	5.19	6.03
Denpasar	2.21	1.79	1.52	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.24	2.1	2.09
Provinsi Bali	5.67	4.59	3.95	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79	5.84

Source: (BPS, Provinsi Bali, 2020)

Tabel 5 memperlihatkan Persentase warga miskin menurut Kabupaten atau kota, dengan keadaan fluktuasi atau terjadinya kenaikan dan penurunan setiap tahun. Adapun rata rata tertinggi persentase warga miskin terjadi pada Kabupaten Karangasem dengan persentase 6,73 persen. Rata rata persentase terendah dapat diperoleh dari Kota Denpasar dengan persentase 2,06 persen.

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan bisa dipakai menjadi sebuah tanda untuk mencari tahu sejahteraan warga. Di mana jenjang pendidikan yang baik akan membuat seseorang lebih baik. Salah satu indikator tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 6 mengenai rata-rata lama sekolah:

Tabel 6. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Tahun)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jembrana	7.05	7.23	7.25	7.27	7.3	7.54	7.5	7.6	7.95	8.22	7.50
Tabanan	7.6	7.68	7.76	7.83	7.91	8.07	8.1	8.4	8.64	8.87	8.08
Badung	8.8	8.96	9.07	9.18	9.29	9.44	9.9	9.9	10.0	10.3	9.50
Gianyar	7.5	7.73	7.99	8.24	8.28	8.49	8.8	8.8	8.92	8.94	8.38

Klungkung	6.6	6.68	6.81	6.88	6.9	6.98	7.0	7.4	7.75	8.12	7.12
Bangli	5.93	5.97	6.01	6.35	6.38	6.41	6.4	6.8	7.13	7.16	6.45
Karangasem	4.55	4.6	5.22	5.34	5.39	5.42	5.4	5.5	5.97	6.31	5.38
Buleleng	6.23	6.39	6.51	6.63	6.66	6.77	6.8	7.0	7.04	7.08	6.71
Denpasar	10.4	10.59	10.8	10.9	10.96	11.0	11.	11.1	11.1	11.2	10.93
Provinsi Bali	7.74	7.77	8.05	8.1	8.11	8.26	8.3	8.5	8.65	8.84	8.243

Source: (BPS, Provinsi Bali, 2020)

Tabel 6 menunjukkan kesenjangan dalam tingkat pendidikan di Bali. Rata-rata lama sekolah dari tahun 2010-2019 di kabupaten atau kota Provinsi Bali menghasilkan rata-rata pendidikan 8.243 tahun. Namun, masih terdapat beberapa kabupaten yang mempunyai nilai tingkat pendidikan di bawah rata-rata Provinsi Bali. Karangasem merupakan kabupaten dengan nilai rata-rata terendah, yaitu 5.38 tahun.

c) Tingkat kesehatan

Kesehatan ialah sebuah aspek penting dalam mendukung kesuksesan pada pembangunan khususnya untuk menaikkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut ditandai dengan angka harapan hidup atau AHH yaitu rerata hidup seseorang dalam setahun, sampai dengan tahun tertentu atau x , dalam kondisi mortalitas yang ada di sekitarnya. (BPS 2020) Semakin tinggi AHH, maka semakin menampakkan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berikut Tabel 5 mengenai angka harapan hidup tahun 2010-2019.

Tabel 7. Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Tahun)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata
Jembrana	70.75	70.92	71.09	71.26	71.39	71.43	71.57	71.7	71.91	72.21	71.42
Tabanan	72.02	72.18	72.35	72.52	72.64	72.74	72.89	73.03	73.23	73.53	72.71
Badung	73.77	73.91	74.05	74.19	74.3	74.31	74.42	74.53	74.71	74.99	74.31
Gianyar	72.31	72.43	72.57	72.71	72.78	72.84	72.95	73.06	73.26	73.56	72.84
Klungkung	69.26	69.45	69.66	69.84	69.91	70.11	70.28	70.45	70.7	71.06	70.07
Bangli	68.8	68.98	69.18	69.36	69.44	69.54	69.69	69.83	70.05	70.37	69.52
Karangasem	68.56	68.76	68.96	69.12	69.18	69.48	69.66	69.85	70.05	70.35	69.39
Buleleng	70.06	70.23	70.41	70.58	70.71	70.81	70.97	71.14	71.36	71.68	70.79
Denpasar	73.24	73.34	73.44	73.56	73.71	73.91	74.04	74.17	74.38	74.68	73.84
Provinsi Bali	70.61	70.78	70.94	71.11	71.2	71.35	71.41	71.46	71.68	71.99	71.25

Source: (BPS, Provinsi Bali, 2020)

Dapat dilihat pada Tabel 7, bahwa setiap tahun angka harapan hidup pada kota yang diteliti mengalami fluktuasi. AHH rata rata tertinggi dari tahun 2010-2019 di dapatkan oleh Kabupaten Badung yaitu 74.31 tahun, angka harapan hidup di Kabupaten Badung menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan tertinggi di kabupaten atau kota Provinsi Bali. Sedangkan, AHH terendah dari tahun 2010-2019 didapatkan oleh Kabupaten Karangasem yaitu 69.39 tahun.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah Sebuah kondisi seseorang termasuk pada angkatan kerja namun belum mendapatkan suatu pekerjaan (Sukirno, 1997). Salah satu indikator untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka digunakan yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka tahun 2010-2019 pada kabupaten /kota Prov. Bali.

Tabel 8. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	2.54	3.53	1.97	3.46	2.95	1.59	2.38	0.67	1.38	1.42
Tabanan	1.07	2.8	2.18	0.8	2.25	1.73	1.75	1.79	1.43	1.28
Badung	1.25	2.28	1.67	0.8	0.48	0.34	1.10	0.48	0.44	0.38
Gianyar	2.36	2.11	1.81	2.23	1.43	1.93	1.43	1.02	1.6	1.42
Klungkung	3.59	2.35	2.09	2.08	1.94	1.39	1.86	0.94	1.41	1.54
Bangli	0.65	0.81	0.9	0.77	0.67	1.72	1.02	0.48	0.8	0.72
Karangasem	2.82	2.7	1.31	1.39	2.06	2.15	1.77	0.72	0.99	0.60
Buleleng	3.26	3.28	3.13	2.15	2.74	2.04	2.42	2.41	1.84	3.02
Denpasar	6.57	4.56	2.57	2.72	2.32	3.54	2.63	2.63	1.82	2.22
Provinsi Bali	3.06	2.95	2.1	1.83	1.9	1.99	1.89	1.48	1.37	1.52

Source: (BPS, Provinsi Bali, 2020)

Tabel 8 menunjukkan persentase jenjang pengangguran terbuka tahun 2010-2019 di Kab/Kota Prov. Bali. Rata rata persentase pengangguran di Bali mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Persentase pengangguran terendah dari tahun 2010-2019 dapat diperoleh Kabupaten Badung yaitu 0.34 pada tahun 2015. Sedangkan persentase pengangguran tertinggi dari tahun 2010-2019 diperoleh Kabupaten Klungkung dengan persentase 3.59 pada tahun 2010.

B. Pembahasan

Uji Spesifikasi Model

1) Uji Chow

Tabel 9. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.973668	(8,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.152575	8	0.0000

Source: hasil olahan views 2021

Pada Tabel 9 Uji Chow, didapat $F_{hitung} = 12.973668$, lalu untuk mendapat angka nilai F_{tabel} , nilai d.f = (8,78), taraf signifikansi alpa 5%. Kemudian didapat angka F_{tabel} nya yaitu 2.06. Hasil uji yang didapatkan memperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , jadi model yang terpilih yaitu FEM.

2) Uji Hausman

Tabel 10. Uji Chow

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.830023	3	0.2804

Source: hasil olahan eviews 2021

Menurut Tabel 10 Uji Hausman, maka diperoleh angka Prob. 0.2804. Taraf signifikansi alfa 5% yaitu 0.05, jadi $0.2804 > 0.05$. Maka yang terbaik digunakan Bentuk *Random*.

Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Bentuk *Random Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.34608	7.864211	2.078540	0.0406
X1	-0.855154	0.135498	-6.311174	0.0000
X2	-0.069513	0.122777	-0.566177	0.5727
X3	0.154348	0.076863	2.008079	0.0478

Source: hasil olahan eviews 2021.

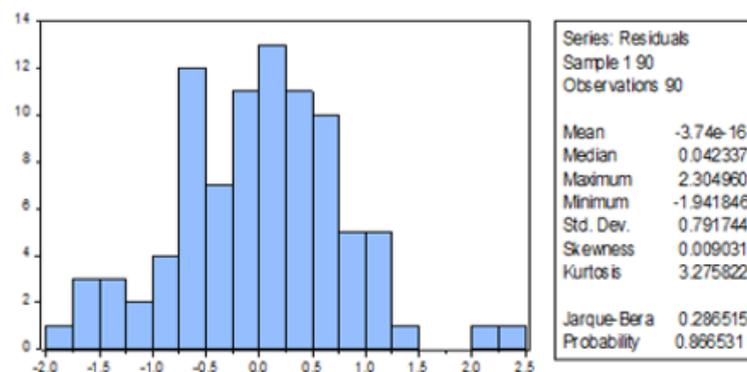
Menurut hasil analisa pada Tabel 11, mendapat persamaan model regresi seperti dibawah ini:

$$Y = 16.346 - 0.855X_1 - 0.069 X_2 + 0.154 X_3$$

Sebelum persamaan itu digunakan, maka dilaksanakan pengujian menggunakan asumsi klasik.

Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas



Source: Hasil olah di Eviews 10, 2021

Gambar 4 Hasil Uji Normalitas

Dapat dilihat pada probability pada Gambar 4 menunjukkan nilai $0.866 > 0.05$, ini menandakan residual berdistribusi normal.

3) Uji Multikolinieritas

Tabel 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 03/16/21 Time: 22:54

Sample: 1 90

Included observations: 90

Variabel	Coefficien t Variance	Uncentere d VIF	Centered VIF
C	61.57368	8542.336	NA
X1	0.018263	160.5206	6.800195
X2	0.014976	10675.99	6.749800
X3	0.007345	4.443874	1.068329

Source : Hasil olahan Eviews 10, 2021

Menurut Tabel 12 memperlihatkan bahwa setiap variabel bebas mempunyai angka *Centered* VIF < 10, jadi bisa dikatakan tidak terdapat gejala yang mengandung multikolinieritas.

4). Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Glejser**

F-statistic	0.743752	Prob. F(3,86)	0.5289
Obs*R-squared	2.275986	Prob. Chi-Square(3)	0.5171
Scaled explained SS	2.266111	Prob. Chi-Square(3)	0.5190

Source: Hasil dari olah data Eviews 10, 2021

Menurut Tabel 13 menjelaskan bahwa Prob. F (3,86) memperoleh nilai sig 0.5289 yang berarti nilai $0.5289 > 0.05$ ini menandakan model tidak ada gejala heteroskedastisitas.

5). Uji Koefisien Regresi secara Simultan

Merujuk Tabel 10, dengan tingkat nyata $\alpha = 0, 05$ atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat bebas $df_1 = 8$ dan $df_2 = 78$. Maka diperoleh nilai $F_{tabel} = 2.06$. Dan nilai $F_{hitung} = 12.973668 > F_{tabel} = 2.06$, jadi dapat disimpulkan H_0 ditolak, ini

berarti secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

6). Uji Koefisien Regresi secara Parsial

Merujuk Tabel 11, diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} -6.311 \leq - 1.663 t_{tabel}$ sesuai kriteria pengujian, maka H_0 ditolak, nilai probnya $0.000 < 0.05$, yang mempunyai arti secara parsial pendidikan berpengaruh negatif dan sig terhadap kemiskinan. Hasil koefisien variabel (X_1) terhadap (Y) yaitu -0.855 menyimpulkan, jika tingkat pendidikan bertambah sebesar 1 tahun menjadikan kemiskinan mendapatkan penurunan senilai 0.855 persen. Asumsi jika variabel bebas (X_2) dan (X_3) konstan.

Pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan memperoleh nilai $t_{hitung} - 0.566 > - 1.663 t_{tabel}$, sesuai kriteria pengujian, maka H_0 diterima, serta berdasarkan nilai probnya $0.572 > 0.05$ yang berarti secara parsial tingkat kesehatan berpengaruh negatif namun tidak sig. Ketika kesehatan dengan indikator angka harapan hidup mengalami peningkatan, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan namun tidak signifikan penurunannya, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan memperoleh nilai $t_{hitung} 2.008 > 1.663 t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan sig. Hasil dari koefisien variabel (X_3) terhadap (Y) = 0.154, menyimpulkan, jika variable (X_3) bertambah sebesar 1 persen menjadikan (Y) juga meningkat 0.154 persen dengan mengasumsikan variabel tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan konstan.

Pengaruh Variabel Dominan

Untuk mengetahui variabel mana yang dominan maka dipakai uji *standardized coefficient beta* dengan mencari *standardized coefficient beta* (β) tertinggi setiap variabel (Gujarati D. , 1997).

Tabel 12 Pengaruh variabel Dominan:

Scaled Coefficients
 Date: 05/17/21 Time: 21:36
 Sample: 1 90
 Included observations: 90

Variable	Coefficient	Standardized Coefficient	Elasticity at Means
C	16.34608	NA	3.056176
X1	-0.855154	-0.838150	-1.373018
X2	-0.069513	-0.055349	-0.758187
X3	0.154348	0.122507	0.075029

Source: Hasil olah data Eviews 10, 2021

Dengan melihat Tabel 12, nilai *standardized coefficient* dari tiap variabel independen diatas, Sehingga didapat variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling tinggi yakni variabel bebas tingkat pendidikan (X_1), karena nilai β nya lebih tinggi dibandingkan variabel lain, yaitu 0.838. Hal ini terjadi karena semakin luas wawasan didukung oleh tingginya pendidikan yang didapat. Sehingga mempermudah mempelajari dan cepat menerima hal hal baru. Meningkatnya tingkat pendidikan akan meningkatkan produktivitas juga.

Pembahasan Riset

Menurut hasil yang diperoleh dari riset ini, kualitas pendidikan mempengaruhi kemiskinan yang ada di Bali, intepretasinya yaitu jika kualitas pendidikan mengalami kenaikan, maka yang terjadi yaitu kemiskinan akan mengalami penurunan. Studi empiris yang mendukung dilihat dari peneliti seperti (Wahyu & et, 2018) menerangkan hasil yang sama namun berlokasi di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Teori *Human Capital* yaitu modal manusia yang ditemukan oleh (Becker, 1993), teori ini mengajarkan bahwa pendidikan bisa meningkatkan keahlian atau *skill* yang bisa meningkatkan produktivitas. Teori ini juga meyakini apabila karyawan/pekerja mempunyai produktivitas yang baik, maka tingkat pendapatan yang diberikan dari perusahaan juga akan meningkat.

Terdapat teori lingkaran setan yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pendidikan yang ditempuh rendah, bisa mempengaruhi produktivitas SDM yang rendah, dan mengakibatkan mendapatkan upah yang rendah pula, sehingga bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Maka dari itu, sangat penting pemerintah untuk mewajibkan biaya pendidikan minimal 20% dari APBD, guna memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, agar kedepannya bisa memutus tali lingkaran setan.

Menurut hasil riset tingkat kesehatan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Bali. Didukung dari riset yang dilaksanakan Faisal (Faisal, 2013), menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan dan tingkat produktivitas di Provinsi Kalimantan Barat. Riset juga didukung oleh Wongdesmiwati, yang menyimpulkan bahwa variabel angka harapan hidup tidak signifikan berpengaruh terhadap warga miskin (Wongdesmiwati, 2009). Studi empiris lain (Fitri & Kaluge, 2017) bahwa variabel biaya pemerintahan di sektor tingkat kesehatan berdampak positif dan tidak signifikan. Karena tidak sejalanannya penambahan kesehatan warga dengan kuantitas kesempatan kerja baru.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS mengenai angka harapan hidup (AHH) tahun 2010-2019, beberapa kabupaten atau kota memperoleh rata-rata AHH di atas rata-rata Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbilang bagus atau sehat. Warga yang memiliki kesehatan dapat juga tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai pengaruh dalam pengurangan kemiskinan. Selain itu juga, data yang diperoleh dari BPS mengenai persentase biaya kesehatan tahun 2015-2019 di Provinsi Bali juga menyatakan bahwa biaya kesehatan sudah menyentuh alokasi biaya minimal bahkan di atas 10 persen dari tahun 2015-2019, berdasarkan UU Kesehatan No 36 Tahun 2006.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang didukung oleh beberapa riset sebelumnya. Studi empiris dilakukan oleh (Adi & Arka, 2018), (Malat & Jeffrey, 2013), (Aristina, Kembar, & Darsana, 2017), (Hu & Giuliano, 2017), (Wirawan & Arka, 2015), (Williams, 2008), (Yanthi & Marheni, 2015), menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka mempunyai hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin bertambahnya pengangguran maka akan mengakibatkan adanya penambahan penduduk yang tidak produktif, sehingga hal tersebut tidak dapat mencukupi keperluan kehidupannya, ketika keperluannya tidak tercukupi dapat mengakibatkan tergoncangnya stabilitas dalam politik negara, selain itu juga dapat mengakibatkan bertambahnya angka kejahatan (Azeng & Thierry, 1991-2009). Berdasarkan Teori dari Harold Domarr (Mulyadi, 2003) berpendapat yaitu, Investasi bisa menambah kapasitas produksi. Ini artinya bahwa semakin meningkat kapasitas produksi suatu perusahaan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap tenaga kerja, dengan asumsi *fullemployment* (pengerjaan penuh). Ini terjadi karena penanaman modal ialah aspek yang menentukan penambahan produksi, dan tenaga kerja merupakan salah satu aspek tersebut.

KESIMPULAN

Secara simultan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kab/kota di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan. Penutup merupakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Simpulan diselaraskan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal simpulan lebih dari satu, maka dituliskan menggunakan penomoran angka dan bukan menggunakan bullet. Dalam bagian penutup ini juga dapat ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya.

BIBLIOGRAFI

- Adi, P., & Arka, S. (2018). Analisis tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 416-444.
- Aristina, I., Kembar, M., & Darsana, I. (2017). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 677-704.
- Azeng, T., & Thierry, U. (1991-2009). Youth Unemployment, Education and Political Instability. *Evidence from selected developing countries*, 200.
- Becker. (1993). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed)*. London: The University of Chicago Press.
- Borjas, G. (2008). *Labor Economics*. Newyork: McGraw-Hill.
- BPS. (2020, September 4). *Provinsi Bali*. Retrieved from <https://bali.bps.go.id:https://bali.bps.go.id/dynamicstable/2018/02/27/252/jumlah-pengangguran-di-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-2007-2015.html>
- BPS. (2020, September 4). *Provinsi Bali*. Retrieved from <https://bali.bps.go.id:https://bali.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- BPS. (2020, September 4). *Provinsi Bali*. Retrieved from <https://bali.bps.go.id:https://bali.bps.go.id/dynamicstable/2018/02/27/252/jumlah-pengangguran-di-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-2007-2015.html>
- BPS. (2020, September 4). *Provinsi Bali*. Retrieved from <https://Bali.bps.go.id:https://bali.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjectviewtab3>
- Dalamagas, B. (2010). Public Sector and economic growth: The greek experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies 2000*, 277-288.
- Dariwardani, N. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 7, no. 1.
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: Evidence from Panel Data. *Bulletin of Indonesian economic studies vol.49 No.1*, 61-84.
- Dollar, D., & Aart Kraay. (2002). Growth is good for the poor. *Journal Of Economic Growth*, 1-14.

- Ewubare, D., Ogbuagu, & Regina, A. (2017). Unemployment rate, gender inequality and economic growth in Nigeria: "A short-run Impact Analysis". *Global Journal of Human Resource Management*, 12-43.
- Faisal, H. (2013). Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan terhadap produktivitas dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat. *Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak*.
- Fitri, & Kaluge. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*, 130-136.
- Gujarati, D. (1997). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hu, L., & Giuliano, G. (2017). Poverty concentration, job access, and employment outcomes. *Journal Bulletin of Indonesia Studies*, 39(1) pp: 1-16.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lim, H.-E. (2011). The determinants of individual unemployment duration: The case of Malaysian Graduates. *Journal of global management*, pp.184203.
- Mahmood, & et al. (2014). Determinants of unemployment in Pakistan: A Statistical Study. *International Journal Of Asian Social Science*, 4(12) Pp 11631175.
- Malat, J., & Jeffrey, T. M. (2013). Country level unemployment change and trends in self-rated health. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(1) pp: 25-46.
- Manning, C., & Junankar. (1998). Choosy Youth Or Unwanted Youth? A survey of unemployment. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 34(1), PP: 55-95.
- Meidani, A. (2011). The dynamic effect of unemployment rate on per capital real GDP in Iran. *International Journal Of Economics and Finance*, 3 (05), pp 170-177.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif pembangunan*. Jakarta: Qudratullah.
- Seran, S. (2017). Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 10, no. 1.
- Shah, A., Shanzadi, U., & Jean, J. (2012). Demand for generic competences in the Labour Market: Reliability of workers perception. *International Journal of Economics and Finance*, pp: 227-240.
- Sri Budhi, M. K. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 6, no. 1.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tisnawati, & Shabrina, R. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Umur, Pendidikan dan Status Pekerjaan terhadap Pendapatan Keluarga Wanita Single Parent. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 7, no. 2.
- Vincent, B. (2009). The concept "poverty" towards understanding in the context of developing countries "poverty" qua povety. *Journal of Sustainable Development*, 2 (2).
- Wahyu, E., & et. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Wardhana, D., Ihle, R., & Heijman, W. (2017). Agro cluster and rural poverty: A Spatial perspective for West Java. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol 53, No 2.
- Williams, D. (2008). Poverty and unemployment traps and trappings. *Journal Bulletin Of Indonesia Studies*, 8 (2), pp: 96-107.
- Williamson, D. (2001). The role of the health sector in addressing poverty. *Canadian Journal of Public Health*, 92(3), pp 178-183.
- Wirawan, N. (2017). *Cara mudah memahami statistika*. Denpasar: Keraras Emas.

- Wirawan, T., & Arka, S. (2015). Analisa pengaruh pendidikan, Pdrb per Kapita dan Tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol.4 no 5.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004: Analisis Ekonometrika. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Yanthi, P., & Marheni. (2015). Pengaruh pendidikan, tingkat upah dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Yuta, Ropika, & Suhartini, A. M. (2014). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 7, no. 2.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).